

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan zaman, segala aspek dalam kehidupan juga dituntut untuk selalu berkembang. Dengan berkembangnya suatu zaman banyak hal yang dituntut untuk melakukan suatu perubahan, tak lain halnya seperti suatu lembaga pemerintahan atau instansi disuatu desa. Dalam hal ini, suatu desa akan selalu melakukan pembangunan agar desa tersebut bisa lebih maju dan berkembang ke arah yang lebih baik serta dapat memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (RI, 2004). Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penjabaran diatas, bahwa suatu desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa dengan tujuan agar pelaksanaan otonomi daerah semakin baik.

Selanjutnya, pemerintah desa beserta lembaga desa merumuskan program pembangunan desa atau dikenal dengan istilah RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) sebagai penjabaran RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) (Sumarna, 2016). Dalam hal ini, untuk menentukan rencana kerja pembangunan pada suatu desa masih memiliki beberapa masalah dikarenakan tidak adanya titik temu dalam hal penentuan pembangunan apa yang

harus diprioritaskan. Pemerintah desa masih melakukan penentuan keputusan dengan cara musyawarah dengan para masyarakat desa dengan tidak adanya aspek yang pasti yang bisa dijadikan bahan pertimbangan. Studi kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah penentuan usulan rencana kerja pembangunan desa (RKPD) di desa Ciburuy Kec. Bayongbong Garut provinsi Jawa Barat, dikarenakan dalam menentukan usulan rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes) masih mengandalkan cara bermusyawarah mengumpulkan para masyarakat desa dan hanya didasari oleh pendapat dan argumen masyarakat desa saja.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan solusi untuk mengurangi permasalahan tersebut dengan cara membangun sebuah sistem informasi berbasis komputer yang dapat membantu memberikan solusi bagi pihak *staff* kantor desa Ciburuy dalam menentukan prioritas RKPDDes berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah ditentukan oleh pihak kantor desa. Pembuatan sistem pendukung keputusan (SPK) ini menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) sebagai metode perhitungan dalam pemecahan masalah, metode ini memiliki konsep dasar mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja apada setiap alternatif pada semua atribut. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) ini membutuhkan normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada (Ainun, 2016). Sistem pendukung keputusan (SPK) ini diharapkan bisa menjadi alat bantu bagi instansi/lembaga terkait untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik (Riadi, 2013).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di uraikan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana cara merancang sistem pendukung keputusan menentukan prioritas RKPDDes menggunakan metode *Simple Additive Weighting*?
2. Bagaimana hasil pengujian sistem pendukung keputusan menentukan prioritas RKPDDes menggunakan metode *Simple Additive Weighting*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendesain perangkat lunak sistem pendukung keputusan menentukan prioritas rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) yang dapat digunakan untuk membantu pengguna yaitu *staff* kantor desa Ciburuy dalam menyeleksi beberapa rekomendasi usulan pembangunan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu membantu seleksi rencana kerja pembangunan infrastruktur pada desa Ciburuy.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian berfokus pada masalah penentuan prioritas rencana kerja pembangunan infrastruktur pada desa Ciburuy, kabupaten Garut, provinsi Jawa barat dengan kriteria yaitu, volume, manfaat, waktu pelaksanaan dan anggaran.